



# Belanja Pegawai

## Melonjak

Belanja pegawai naik tak langsung sebesar Rp 165,417 miliar, sedangkan untuk usaha ekonomi produktif (UEP) hanya dialokasikan Rp 45 miliar untuk 600 rumah tangga.

MANGUPURA, NusaBali

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2016 menjadi sorotan anggota dewan. Pasalnya, dalam RAPBD 2016 yang disampaikan Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka pada rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (20/11), terungkap bahwa belanja pegawai tidak langsung naik 14,80 persen daripada tahun ini.

Pada APBD induk 2015 belanja pegawai tidak lang-

sung tercatat sebesar Rp 1.117.317.955.595,68. Sementara pada RAPBD 2016 naik 14,80 persen menjadi Rp 1.282.735.885.834,08.

Yang membuat anggota dewan kecewa adalah alokasi untuk sektor publik atau kebutuhan rakyat justru terkesan tak pro rakyat. Contoh dukungan untuk usaha ekonomi produktif (UEP) misalnya, hanya memperoleh alokasi Rp 4,5 miliar untuk 600 rumah tangga sasaran. Jadi tiap RTS memi-

peroleh hanya Rp 7,5 juta. Menurut dewan, dana Rp 7,5 juta ini hanya cukup untuk sewa tempat, sementara komoditas yang akan diproduksi maupun diperdagangkan belum ada. "Badung berpeluang membantu UEP hingga Rp 10 juta per RTS," kata anggota DPRD Badung I Wayan Sumerta.

Tak ayal RAPBD 2016 ini oleh kalangan dewan dinilai tak pro rakyat. Sebab hanya kepentingan pegawai saja yang diperhatikan, sementara kepent-



● NUSABALI/YUDA  
PENJABAT Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka (kiri) didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta (kanan) saat rapat paripurna penjelasan Bupati Badung terhadap RAPBD 2016 di gedung DPRD Badung, Jumat (20/11).

ingan masyarakat Badung secara umum minim.

Anggota DPRD yang kecewa terhadap postur RAPBD 2016 adalah I Nyoman Sentana. Politisi Abiansemal itu menyindir kebijakan pemerintah tersebut tak pro rakyat. "Ini yang kami bahas di tingkat rapim (rapat pimpinan)," tegas Sentana. Terhadap RAPBD tersebut ia menegaskan agar kebijakan pemerintah jangan sampai menyengsarakan masyarakat. Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka saat dimintai konfirmasi terkait kenaikan belanja pegawai ini, menyatakan, kenaikan belanja tidak langsung bagi pegawai ini untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kenaikan ini berkaitan dengan kinerja pegawai. "Kita harapkan peningkatan PAD juga diimbangi dengan peningkatan penghasilan pegawai. Itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam RAPBD tahun 2016, pendapatan daerah dirancang Rp 3.598.525.631.619,64, meningkat Rp 374.254.987.135,76 atau 10,68 persen dari in-

duk 2015 sebesar Rp 3.251.270.644.483,88. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 2.931.777.742,82, meningkat 13,55 persen atau 349.878.973,75 dari tahun 2015 sebesar Rp 2.581.898.853,07.

Kemudian, dana perimbangan dirancang Rp 314.723.540.280,00, menurun Rp 34.829.091.217,00 atau 9,96 persen dari tahun 2015 sebesar Rp 349.552.631.497,00. Selanjutnya, pendapatan lain-lain yang sah, Rp 352.024.349.196,00, meningkat sebesar Rp 32.205.105.063,01 atau 10,07 persen dari tahun 2015 sebesar Rp 319.819.244.133,81.

Asumsi target ekonomi makro pada RAPBD tahun 2016 yakni; pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,80 persen - 7,25 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 36,938 triliun. Selanjutnya, PDRB atas harga konstan sebesar Rp 8,747 triliun. PDRB perkapita sebesar Rp 46.222.595. Kemudian laju inflasi sebesar 6,00 persen - 7,00 persen serta dan tingkat kemiskinan 2,00 persen - 2,25 persen. asa





## Di Balik Pergolakan Desa Tunjung Kubutambahan

# Warga Tanyakan Dana Miskin Rp 2M Luput

Pihak BPD menyebut bantuan dana tersebut sejatinya sangat diharapkan oleh warga kurang mampu yang jumlahnya sekitar 505 jiwa dari total jumlah penduduk 3.000 jiwa.

SINGARAJA, NusaBali

Sejumlah warga mempertanyakan pengalihan bantuan dana untuk warga miskin di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan sebesar Rp 2 miliar. Dana tersebut yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh warga setempat belakangan diketahui telah dialihkan untuk

warga miskin lainnya di Desa/Kecamatan Kubutambahan.

Warga menuding pengalihan itu akibat tindakan dari aparat Desa Tunjung yang tidak mau menerima kucuran dana tersebut. "Ada dana Rp 2 miliar untuk warga miskin, kok ditolak oleh Perbekel, ini kan aneh sekali," ungkap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tunjung, Nyoman Rawi belum lama ini.

Menurut Rawi, sejatinya bantuan dana tersebut sangat diharapkan oleh warganya yang kurang mampu. Disebutkan di Desa Tunjung diperkirakan terdapat 505 warga miskin dari jumlah penduduk 3 ribu jiwa. "Ini kan sungguh menyedihkan, kenapa bantuan yang diharapkan itu ditolak. Karena ditolak itu, sekarang bantuannya jatuh ke Desa Kubutambahan," katanya.

Disebutkan pula, pihaknya

mendapat kabar penolakan itu hanya gara-gara tidak ada kelompok yang bisa menerima bantuan tersebut. Karena dana itu akan dikucurkan kepada masing-masing kelompok masyarakat yang kurang mampu. "Kalau membentuk kelompok itu gampang, tidak perlu waktu lama. Cuma ini kan tidak ada sosialisasi ke masyarakat," ketus Rawi.

Rawi sendiri merupakan anggota BPD Desa Tunjung yang selama ini getol mendesak Pemkab Buleleng memberhentikan Perbekel I Made Sadia dari jabatannya. Desakan itu belakangan terus bergolak karena Sadia dianggap telah tercela karena sebagai tersangka kasus dugaan pengerusakan pohon. Apalagi Sadia kini telah menjadi terdakwa karena kasusnya telah disidang di PN Singaraja.

Untuk urusan ini, Perbekel Sadia belum bisa dikonfirmasi. Namun Camat Kubutambahan I

Komang Sumertajaya dikonfirmasi Jumat (20/11) membenarkan ada bantuan dana yang tadinya untuk Desa Tunjung sudah dialihkan ke Desa Kubutambahan. Bantuan dana tersebut berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Infrastruktur Ekonomi (BKK-PIE) dari pemerintah pusat tahun anggaran 2015.

Dijelaskan, pengalihan bantuan dana dari Desa Tunjung ke Desa Kubutambahan itu, bukan

karena kucuran dana itu ditolak oleh aparat Desa Tunjung. Pengalihan terjadi karena, pihak pemberi bantuan menilai yang lebih layak menerima kucuran dana bantuan tersebut adalah Desa Kubutambahan.

Alasannya, dari segi jumlah penduduk miskin lebih banyak di Desa Kubutambahan dibandingkan di Desa Tunjung. Selain itu, aparat Desa Tunjung khawatir jika dana bantuan itu diterima tidak

terserap karena dana itu baru cair di penghujung tahun.

Selain itu, dari analisis pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari kecamatan menganggap tim pengawas lebih mudah menjangkau di Desa Kubutambahan dibandingkan mengawasi di Desa Tunjung. Setelah disepakati BKK-PIE dialihkan, dana saat ini telah cair dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di Desa Kubutambahan.

"Bukan ditolak, namun dari musyawarah antar desa yang sudah kita lakukan itu yang lebih siap adalah Desa Kubutambahan, dan Desa Tunjung tidak siap. Dari hitung-hitungan pusat, jumlah warga miskin lebih sedikit dibandingkan di Desa Kubutambahan. Dana itu juga sudah terealisasi November dan Desember 2015 nanti danya sudah dipertanggungjawabkan," tegasnya. **k19**

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 4





## Santunan Kematian Dinilai Terlalu Kecil

MANGUPURA, NusaBali

Dengan pendapatan asli daerah (PAD) triliunan rupiah, Pemkab Badung dinilai terlalu kecil memberikan santunan kematian kepada warganya. Padahal santunan kematian sebesar Rp 5 juta pun Pemkab Badung mampu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan.

Melihat RAPBD Badung Tahun 2016, jaminan sosial kematian hanya dianggarkan sebesar Rp 5 miliar untuk dua ribu jiwa. Jika dibagi masing-masing orang akan mendapatkan Rp 2,5 juta. Bantuan ini dinilai sangat kecil, sehingga perlu ditingkatkan minimal menjadi Rp 5 juta per orang.

"Kami minta santunan kematian ditambah. Menurut kami bantuan Rp 2,5 juta itu terlalu kecil. Kalau bisa ya minimal tahun 2016 diberikan Rp 5 juta. Itu total dananya paling Rp 10 miliar," kata anggota Komisi III DPRD Badung I Made Sumerta usai rapat paripurna RAPBD Badung di gedung dewan, Jumat (20/11).

Pertimbangan politisi asal Pecatu, Kuta Selatan, ini mengontrol santunan kematian, agar masyarakat yang anggota keluarganya terkena musibah mendapat keringanan dari sisi pembiayaan. Sekarang ini, harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Paling tidak dengan bantuan dari pemerintah, dapat meringankan beban

keluarga yang ditinggalkan.

Semangat utama bantuan santunan kematian, kata Sumerta, bagaimana membantu pendanaan selama upacara berlangsung. Makanya, nominal Rp 2,5 juta itu tidak cukup. "Sekarang biaya upacara ngaben itu mahal. Jadi santunan ini perlu ditingkatkan," harapnya.

Melihat APBD Badung tahun 2016 yang dirancang sebesar Rp 3,5 triliun, Sumerta menilai pemerintah Badung sangat sanggup menambah dana santunan kematian. "Uang Badung banyak. Masak membantu masyarakat takut. Apalagi santunan kematian ini memang sangat diperlukan," tegasnya.

Namun pemerintah memiliki pandangan lain. Versi pemerintah, bantuan ini sebagai bentuk perhatian yang diberikan pemerintah. Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka mengakui jaminan sosial kematian untuk krama Badung pada tahun 2016 yang dirancang Rp 5 miliar untuk dua ribu orang, adalah wujud perhatian pemerintah.

"Dengan bantuan ini, Pemkab Badung telah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat," kata Yudha Saka. Lebih lanjut, jelasnya, secara umum perlindungan sosial ini diberikan tidak saja pada saat orang sudah meninggal, tapi perlindungan sosial ini sudah diberikan mulai dari lahir. **asa**

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 2